

**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT**

NOTA DINAS

NOMOR: AK.03.01/10/INS.M.EKON/01/2026

Yth. : Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama
Dari : Inspektur
Lampiran : 1 (satu).berkas
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Triwulan IV Tahun 2025
Tanggal : 12 Januari 2026

Menindaklanjuti Nota Dinas Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Nomor AK.03.01/12/SET.M.EKON.1/01/2026 tanggal 9 Januari 2026, bersama ini disampaikan Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Inspektur,



Mirza Sofjanhadi Mashudi, S.E., M.Si
NIP 197001181996031001

Laporan Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025
Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

A. Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Hasil pengukuran kinerja Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 dapat ditampilkan pada Tabel 1, sebagai berikut:

Tabel 1. Ringkasan Capaian Kinerja Inspektorat Triwulan IV Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
I	Sasaran Kegiatan 1. <i>Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Memadai</i>				
1.1	Indikator 1.1 Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	3,58	3,886	108,55%
1.2	Indikator 1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Percentase	75%	85,78%	114,37%
1.3	Indikator 1.3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Nilai	0,50	N/A	N/A
1.4	Indikator 1.4 Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100%
1.5	Indikator 1.5 Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	82	81,77	99,72%
1.6	Indikator 1.6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Nilai	3	N/A	N/A
1.7	Indikator 1.7 Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	Nilai	3,27	3,28	100,31%
II	Sasaran Kegiatan 2. <i>Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal Yang Agile</i>				
2.1	Indikator 2.1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	Percentase	80%	83,33%	104,17%
2.2	Indikator 2.2 Persentase Rekomendasi Audit Internal Yang Ditindaklanjuti	Percentase	80%	81,15%	101,43%
III	Sasaran Kegiatan 3. <i>Terwujudnya Transformasi</i>				

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun 2025	Realisasi Triwulan IV	Capaian (%)
3.1	APIP sebagai Trusted Advisor dan Strategic Partner Indikator 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat	Indeks	3 dari 4	3,65	91,25%
3.2	Indikator 3.2 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi	Persentase	90%	100%	111%
IV	Sasaran Kegiatan 4. Terwujudnya Tata Kelola APIP Yang Baik Indikator 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat	Persentase	85%	92,73%	109,09%

Kinerja Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam ringkasan Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Memadai

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Sistem Pengendalian Internal Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yang Memadai ditunjukkan oleh pencapaian 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu:

1. Tingkat Maturitas SPIP
2. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
3. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas
4. Opini BPK
5. Survei Penilaian Integritas (SPI)
6. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
7. Nilai Kapabilitas APIP (IACM)

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1 Tingkat Maturitas SPIP

Latar Belakang

Nilai Maturitas SPIP adalah nilai yang diberikan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas penerapan sistem pengendalian internal di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penilaian Tingkat Maturitas SPIP terdiri dari komponen penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan. Level Maturitas SPIP terdiri dari Level 0 = Belum ada; Level 1 = Rintisan; Level 2 = Berkembang; Level 3 = Terdefinisi; Level 4 = Terkelola & Terukur; dan Level 5 = Optimum.

Tujuan penilaian Maturitas SPIP yaitu untuk mengukur tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan kegiatan/program di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja IKU Tingkat Maturitas SPIP Tahun 2025 sebesar 3,58 yang berada pada level 3 atau tingkat maturitas berada di tingkat terdefinisi. Target ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Tahun 2025 dan target ini tidak dapat diproyeksikan per triwulan karena IKU Tingkat Maturitas SPIP adalah nilai evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP oleh BPKP yang diterbitkan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, realisasi Tingkat Maturitas SPIP sebesar 3,886 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.1 1.1. Tingkat Maturitas SPIP	Nilai	3,58	3,886	108,55%

Tingkat Maturitas SPIP merupakan *cascading indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2025 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 84,01. Hingga Triwulan IV Tahun 2025, BPKP belum menerbitkan Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 sehingga Realisasi capaian kinerja IKU Tingkat Maturitas SPIP didasarkan pada nilai hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menggunakan kriteria penilaian BPKP, yaitu sebesar 3,886 atau berada pada Level 3 (Terdefinisi). Hingga laporan ini disusun, BPKP baru menerbitkan Notisi Hasil Evaluasi atas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 31 Desember 2025, dengan hasil penilaian yang belum bersifat final sehingga masih berpotensi mengalami perubahan.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.1 Tingkat Maturitas SPIP			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I-IV)	Status (hingga Triwulan IV)	Keterangan (hingga Triwulan IV)
	Triwulan I		
1.	Rapat Pendampingan Penyusunan Matriks Manajemen Risiko	Tertunda dan Digeser	Rapat pendampingan penyusunan matriks manajemen risiko belum dilaksanakan dan rencananya dilaksanakan

			pada triwulan berikutnya
2.	Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Gratifikasi dan Konflik Kepentingan Triwulan IV Tahun 2024	Terlaksana	Penyusunan laporan hasil pemantauan gratifikasi dan konflik kepentingan Triwulan IV tahun 2024 telah dilaksanakan
3.	Penyusunan <i>Draft</i> Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPIP Terintegrasi Tahun 2024	Terlaksana	Penyusunan <i>draft</i> matriks pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi SPIP Terintegrasi tahun 2024 telah dilaksanakan
	Triwulan II		
4.	Rapat Pendampingan Penyusunan Matriks Manajemen Risiko	Terlaksana	Rapat pendampingan penyusunan matriks manajemen risiko telah dilaksanakan
5.	Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi Unit Kerja	Terlaksana	Pendampingan penilaian mandiri SPIP terintegrasi unit kerja telah dilaksanakan
6.	Pengisian Kertas Kerja (KK) Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi oleh Unit Kerja	Terlaksana	Pengisian kertas kerja (KK) penilaian mandiri SPIP terintegrasi oleh unit kerja telah dilaksanakan
7.	Penyusunan Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPIP Terintegrasi Tahun 2024	Terlaksana	Penyusunan matriks pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi SPIP terintegrasi tahun 2024 telah dilaksanakan
8.	Penyusunan <i>Draft</i> Peraturan terkait Pengendalian Gratifikasi dan Konflik Kepentingan	Terlaksana	Penyusunan <i>draft</i> peraturan terkait pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan telah dilaksanakan
	Triwulan III		
9.	Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Gratifikasi dan Konflik Kepentingan Semester I Tahun 2025	Terlaksana	Laporan hasil pemantauan gratifikasi dan konflik kepentingan semester I tahun 2025 telah disusun.

10.	Evaluasi SPIP terintegrasi oleh BPKP tahun 2025	Tertunda dan Digeser	Evaluasi SPIP terintegrasi oleh BPKP belum dilaksanakan dan rencananya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya karena masih dalam proses penjaminan kualitas (PK)
11.	Penetapan Peraturan terkait Pengendalian Gratifikasi dan Konflik Kepentingan	Tertunda dan Digeser	Peraturan terkait pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan masih dalam bentuk <i>draft</i> sehingga belum ditetapkan
12.	Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi oleh Inspektorat	Terlaksana	Penjaminan kualitas atas penilaian mandiri SPIP terintegrasi sedang dilaksanakan oleh Inspektorat
Triwulan IV			
13.	Evaluasi SPIP terintegrasi oleh BPKP tahun 2025	Terlaksana	Evaluasi dilaksanakan oleh BPKP pada bulan Desember dan telah disampaikan Notisi Hasil Sementara Evaluasi SPIP Terintegrasi Tahun 2025 oleh BPKP pada tanggal 31 Desember 2025
14.	Penetapan Peraturan terkait Pengendalian Gratifikasi dan Konflik Kepentingan	Gagal Dilaksanakan	Peraturan masih dalam bentuk <i>draft</i> karena kurangnya arahan dari Kementerian PAN-RB terkait penerbitan peraturan tersebut dan belum diadakan uji publik atas peraturan tersebut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
15.	Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SPIP Terintegrasi Tahun 2024	Terlaksana	Penyusunan laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi SPIP terintegrasi tahun 2024 telah dilaksanakan dengan menerbitkan laporan nomor PW.04.03/29/INS.M.EKON/12/2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Nota Dinas Tindak Lanjut *Risk Register* (Penyampaian Konsep Identifikasi Risiko)
2. Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2024
3. Pelaksanaan Rapat Persiapan Penilaian Mandiri (PM) Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tahun 2025
4. Pelaksanaan Rapat Persiapan *Coaching Clinic* Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Aksi Unit Kerja Tahun 2025
5. Pelaksanaan Pendampingan Penyusunan Profil Risiko Unit Kerja dan Mitigasi Unit Kerja Tahun 2025
6. Menghadiri Bimbingan Teknis Pengisian Kertas Kerja (KK) PM SPIP 2025
7. Penyampaian Nota Dinas terkait Penyampaian Hasil PM maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang telah dilakukan oleh Tim Asesor PM Unit Kerja Inspektorat
8. Penyampaian Nota Dinas Pengisian Survei Evaluasi AKIP 2025
9. Pelaksanaan Evaluasi AKIP Tahun 2025
10. Penyusunan dan/atau penyampaian beberapa laporan pengawasan, diantaranya Laporan Hasil Reviu Sementara atas Dokumen Usulan Kebutuhan Alokasi Anggaran BA BUN 999.08 Transisi Program Kartu Prakerja Tahun Anggaran 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 Tahap Seleksi Kompetensi Bidang pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Laporan Hasil Reviu atas Dokumen Usulan Kebutuhan Alokasi Anggaran BA BUN 999.08 Transisi Program Kartu Prakerja Tahun Anggaran 2025, Laporan Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Kemenko Perekonomian Tahun 2024, Laporan Hasil Pengawasan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2024 Tahap Pengumuman Akhir pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Laporan Hasil Pemeriksaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) TA 2024, Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024, Laporan Hasil Pengawasan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap III Tahun Anggaran 2024 Tahap Perencanaan s.d. Seleksi Administrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Laporan Pemantauan Pelaksanaan Hibah Periode Januari–Desember 2025, Laporan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Periode Januari–Desember 2025, Laporan Hasil Reviu Rencana Aksi dan Manual IKU tahun 2025, Laporan Hasil Pengawasan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap III Tahun Anggaran 2024 Tahap Seleksi Kompetensi dan Wawancara s.d. Pengumuman Hasil Seleksi pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Laporan Pendampingan Pelaksanaan Kontrak PCO *Joint Announcement on the Substantial Conclusion of the IEU-CEPA dan EU Business Outlook*, Laporan Hasil Audit Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Tahun Anggaran 2024, Laporan Hasil Reviu atas Dokumen Pertanggungjawaban Rangkaian Kegiatan *Joint Announcement on the Substantial Conclusion of the IEU-CEPA dan EU Business Outlook*, Laporan Hasil Evaluasi AKIP Eselon I Kementerian

Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025, Laporan Penilaian Mandiri atas Kapabilitas APIP Tahun 2025, Laporan Hasil Reviu atas Usulan Revisi DIPA TA 2026, dan Laporan Hasil Reviu atas Usulan Tambahan Anggaran Kebutuhan Biaya Aksesi OECD Tahun 2024–2026.

Pelaksanaan rencana aksi selama triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi efisiensi sumber daya diproyeksikan sebesar Rp500.000, yang berasal dari efisiensi penghematan biaya jasa *editing* video telah digunakan untuk mendukung IKU 1.5 Survey Penilaian Integritas pada triwulan IV, salah satunya dalam rangka menyelenggarakan acara Hari Peringatan Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 yang membahas terkait integritas dan profesionalisme dalam mewujudkan pemerintahan bersih dan ekonomi kuat.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi secara umum telah berjalan dengan baik. Namun, terdapat satu rencana aksi yang belum berhasil dilaksanakan, yaitu penetapan peraturan terkait pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan. Hal ini disebabkan oleh minimnya arahan dari Kementerian PAN-RB terkait penerbitan peraturan dimaksud, serta belum dilaksanakannya uji publik atas rancangan peraturan tersebut di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada unit kerja Inspektorat, maka disusun upaya perbaikan yang dapat dilakukan yaitu melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan Kementerian PAN-RB untuk memperoleh arahan terkait penerbitan peraturan pengelolaan konflik kepentingan dan pengendalian gratifikasi, menyusun dan mematangkan rancangan peraturan dimaksud serta melaksanakan uji publik secara komprehensif agar penetapan peraturan tersebut dapat direalisasikan.

1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK

Latar Belakang

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai unit pengawas eksternal melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kemudian memberikan rekomendasi atas temuan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan. Inspektorat melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi atas temuan dari BPK yang dilakukan oleh audit. Ruang lingkup rekomendasi yaitu terkait sistem pengendalian internal dan tata kelola. Status tindak lanjut selesai atau belum ditentukan oleh BPK. Tujuan tindak lanjut rekomendasi BPK adalah untuk mengetahui tingkat rekomendasi dari BPK yang telah ditindaklanjuti oleh audit.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada tahun 2025 adalah 75% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektor tahun 2025.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, realisasi Tindak Lanjut Rekomendasi BPK sebesar 85,78% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.2 1.2. Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	Persentase	75%	85,78%	114,37%

Tindak Lanjut Rekomendasi BPK merupakan *cascading indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian dengan target sebesar 84,01 pada tahun 2025. Sampai dengan laporan ini disusun, berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dan Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK dari tahun 2005 s.d. 2024 terdapat 193 tindak lanjut telah sesuai rekomendasi dari total 225 rekomendasi atau realisasi sebesar 85,78%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi hingga triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.2 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I-IV)	Status (hingga Triwulan IV)	Keterangan (hingga Triwulan IV)
	Triwulan I		
1.	Pemutakhiran Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK hingga Triwulan IV Tahun 2024	Terlaksana	Pemutakhiran matriks pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK hingga Triwulan IV tahun 2024 telah dilaksanakan
	Triwulan II		
2.	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Unit Kerja hingga Semester I Tahun 2025	Terlaksana	Tindak lanjut rekomendasi BPK dengan unit kerja hingga semester I tahun 2025
	Triwulan III		
3.	Pemutakhiran Matriks Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi BPK hingga Semester I Tahun 2025	Terlaksana	Pemutakhiran matriks pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK hingga Semester I tahun 2025 telah dilaksanakan
	Triwulan IV		

4.	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Unit Kerja hingga Semester II Tahun 2025	Terlaksana	Tindak lanjut rekomendasi BPK dengan unit kerja hingga semester II tahun 2025 telah dilaksanakan
----	---	------------	--

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Rapat *Entry Meeting* BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian dan MPPKP Tahun Anggaran 2024
2. Rapat pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Triwulan IV Tahun 2024
3. Rapat pemaparan tentang perubahan struktur organisasi Kemenko Perekonomian sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 dan implikasinya terhadap pengelolaan keuangan, kepegawaian, BMN, dan lain-lain
4. Rapat pemaparan hibah
5. Penyampaian permintaan data/dokumen pemutakhiran *database* entitas pemeriksaan BPK
6. Penyampaian nota dinas terkait pemantauan tindak lanjut (TL) rekomendasi BPK PDTT KEK
7. Penyampaian nota dinas terkait pemantauan tindak lanjut (TL) rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8. Penyampaian nota dinas terkait penyampaian pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK semester I tahun 2025
9. Penyampaian nota dinas terkait penyampaian hasil tindak lanjut (TL) pemeriksaan BPK atas program penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional pada Kementerian Keuangan yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
10. Penyampaian nota dinas kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait permohonan persetujuan konsep surat tindak lanjut (TL) atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK TA 2024
11. Penyampaian nota dinas kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait permohonan penandatanganan nota dinas pengantar atas surat tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan MPPKP tahun 2024

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya penyampaian nota dinas melalui media digital sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp200.000 dari biaya pembelian kertas dan biaya pengiriman dokumen ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran belanja pemerintah, anggaran yang tersedia dialokasikan untuk mendukung program atau kegiatan yang lebih prioritas.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, tidak terdapat kendala yang mempengaruhi ketercapaian rencana aksi sehingga seluruh rencana aksi pada IKU Tindak Lanjut Rekomendasi BPK telah terlaksana.

1.3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas

Latar Belakang

Zona Integritas yang selanjutnya disingkat ZI adalah instansi pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. Unit kerja melakukan pembangunan zona integritas yang nantinya akan dievaluasi oleh Tim Penilai Nasional (TPN) dalam hal ini Kementerian PAN-RB. Terdapat 3 tahap evaluasi oleh TPN yaitu pra-evaluasi atau seleksi administrasi, *desk evaluation*, dan evaluasi lapangan. Tujuan pengukuran tingkat keberhasilan zona integritas adalah untuk mengetahui tingkat pembangunan ZI di lingkungan Kemenko Bidang Perekonomian untuk mewujudkan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut kategori penilaian Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas:

Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	Nilai
>75%	3
>40% - 75%	2
>10% - 40%	1
0,1% - 10%	0,75
0%	0,5
Tidak Mengusulkan	0

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 sebesar 0,5 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektur Tahun 2025.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, realisasi Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas adalah N/A dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.3 1.3. Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas	Nilai	0,5	N/A	N/A

Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan *cascading indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2025 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 84,01. Pada tahun 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak mengusulkan unit kerja yang akan dibangun menjadi unit percontohan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) karena adanya reorganisasi Kemenko Perekonomian sehingga unit kerja tidak memenuhi persyaratan minimal pelaksanaan pembangunan zona integritas selama 1 (satu) tahun.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada

Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.3 Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I-IV)	Status (hingga Triwulan IV)	Keterangan (hingga Triwulan IV)
	Triwulan I		
1.	Penetapan Penunjukan Unit Kerja Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Terlaksana	Unit Kerja yang akan dibangun menjadi unit percontohan menuju WBK telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 34 Tahun 2025
	Triwulan II		
2.	Penyusunan Matriks Pemantauan Hasil Evaluasi ZI oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Tahun 2024	Terlaksana	Penyusunan matriks pemantauan hasil evaluasi ZI oleh Tim Penilai Nasional (TPN) tahun 2024 telah dilaksanakan
	Triwulan III		
3.	Pendampingan pembangunan ZI di lingkungan unit kerja yang dibangun	Terlaksana	Pendampingan pembangunan ZI di lingkungan unit kerja yang dibangun telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2025
4.	Pemantauan pelaksanaan pembangunan ZI unit kerja	Tertunda dan Digeser	Pemantauan pelaksanaan pembangunan ZI unit kerja belum dilaksanakan
	Triwulan IV		
5.	Pemantauan pelaksanaan pembangunan ZI unit kerja	Terlaksana	Pemantauan pelaksanaan pembangunan ZI unit kerja telah dilaksanakan dan tertuang di dalam Laporan Pemantauan Pelaksanaan Pembangunan ZI di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PW.04.05/45/INS.M.EKON.

			2/12/2025 tanggal 29 Desember 2025
6.	Penilaian pembangunan ZI unit kerja oleh Tim Penilai Internal	Terlaksana	Rapat pembahasan terkait penilaian Lembar Kerja Evaluasi pembangunan ZI unit kerja oleh Tim Penilai Internal telah dilaksanakan pada tanggal 19 dan 23 Desember 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Rapat Persiapan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025
2. Pelaksanaan Rapat Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 pada unit kerja Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN
3. Pelaksanaan Rapat Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 yang membahas mengenai kertas kerja dan *timeline* pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM Tahun 2025
4. Pelaksanaan Rapat Penilaian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2025
5. Penyampaian nota dinas terkait pelaksanaan survei mandiri evaluasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM Tahun 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diwujudkan melalui optimalisasi pemanfaatan fasilitas ruang rapat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk kegiatan rapat pembahasan penilaian LKE pembangunan ZI tahun 2025, dengan proyeksi penghematan sebesar Rp29.575.000. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya yang mendukung IKU 1.5 Survey Penilaian Integritas pada triwulan IV dalam rangka menyelenggarakan acara Hari Peringatan Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 yang membahas terkait integritas dan profesionalisme dalam mewujudkan pemerintahan bersih dan ekonomi kuat.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, tidak terdapat kendala yang mempengaruhi ketercapaian rencana aksi sehingga seluruh rencana aksi pada IKU Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas telah terlaksana.

1.4 Opini BPK

Latar Belakang

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pengakuan dan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan memperhatikan Kesesuaian penyajian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntasi Pemerintah (SAP); Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan pengungkapan yang diatur SAP; Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan Efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Tujuan Opini

BPK adalah memberikan pernyataan atau opini bahwa laporan keuangan telah disajikan dengan wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.

Opini yang dihasilkan terdiri dari 4 jenis, yaitu:

- 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP, Nilai capaian 4)
- 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP, Nilai capaian 3)
- 3) Tidak Wajar (TW, Nilai Capaian 2)
- 4) Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer*, Nilai Capaian 1)

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Opini BPK pada tahun 2025 adalah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2025. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *Unqualified Opinion* didapatkan apabila berdasarkan Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK. Laporan Keuangan (LK) Kementerian telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan (neraca), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Target ditentukan berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi target keandalan dalam penyusunan laporan keuangan.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, realisasi Opini BPK adalah WTP dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.4 1.4. Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	100%

Opini BPK pada Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian merupakan *cascading indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2025 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 84,01. Sampai dengan laporan ini disusun, Realisasi IKU Opini BPK adalah WTP didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2024.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi hingga Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.4 Opini BPK			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I-IV)	Status (hingga Triwulan IV)	Keterangan (hingga Triwulan IV)
	Triwulan I		
1.	Reviu Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian TA 2024	Terlaksana	Reviu Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian TA 2024 telah dilaksanakan

2.	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	Terlaksana	Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan telah dilaksanakan
3.	Rapat Koordinasi permintaan dokumen pendukung pemeriksaan keuangan BPK	Terlaksana	Rapat Koordinasi permintaan dokumen pendukung pemeriksaan keuangan BPK telah dilaksanakan dengan menerbitkan undangan nomor PW.03.01/06/INS.M.EKON/01/2025
4.	Reviu PAPBJ TW I TA 2025	Gagal Dilaksanakan	Terdapat perubahan Agenda Prioritas Pengawasan BPCKP Tahun 2025 sehingga Reviu PAPBJ triwulanan tidak dilaksanakan
Triwulan II			
5.	Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Tertunda dan Digeser	Sosialisasi penyusunan rencana kerja dan anggaran belum dilaksanakan
6.	Reviu PAPBJ TW II TA 2025	Gagal Dilaksanakan	Terdapat perubahan Agenda Prioritas Pengawasan BPCKP Tahun 2025 sehingga Reviu PAPBJ triwulanan tidak dilaksanakan
7.	Reviu Revisi/ Tambahan Anggaran Kemenko	Terlaksana	Reviu revisi/tambahan anggaran Kemenko telah dilaksanakan
Triwulan III			
8.	Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran	Gagal Dilaksanakan	Sosialisasi penyusunan rencana kerja dan anggaran gagal dilaksanakan karena keterbatasan anggaran
9.	Reviu Laporan Keuangan Kemenko Perekonominan Semester I TA 2025	Terlaksana	Reviu Laporan Keuangan Kemenko Perekonominan Semester I TA 2025 telah dilaksanakan yang dituangkan ke dalam laporan hasil reviu nomor PW.03.01/17/INS.M.EKON/07/2025
10.	Reviu RKA-K/L Kemenko TA 2026	Terlaksana	Reviu RKA-K/L Kemenko Perekonominan TA 2026 telah dilaksanakan hingga pada

			level eselon II, yang hasilnya dituangkan dalam laporan reviu masing-masing unit Eselon I di lingkungan Kemenko Perekonomian
11.	Reviu PAPBJ TW III TA 2025	Gagal Dilaksanakan	Terdapat perubahan Agenda Prioritas Pengawasan BPKP Tahun 2025 sehingga Reviu PAPBJ triwulan tidak dilaksanakan
Triwulan IV			
12.	Reviu Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian TW III TA 2025	Gagal Dilaksanakan	Terdapat penyesuaian kebijakan terkait Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga Triwulan III Tahun 2025 berdasarkan Surat Dinas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-208/PB/2025 tanggal 30 September 2025
13.	Reviu PAPBJ TW IV TA 2025	Gagal Dilaksanakan	Terdapat perubahan Agenda Prioritas Pengawasan BPKP Tahun 2025 sehingga Reviu PAPBJ triwulan tidak dilaksanakan

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Koordinasi dengan BPK, Biro Umum, dan unit kerja terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan rencana aksi untuk mendukung ketercapaian IKU
2. Penyampaian nota dinas terkait permintaan tanggapan atas konsep temuan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemenko Perekonomian tahun anggaran 2024
3. Penyampaian konsep surat penyampaian *action plan* LHP BPK
4. Penyampaian surat dinas terkait penyampaian tanggapan atas konsep temuan pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemenko Perekonomian tahun anggaran 2024
5. Penyampaian surat dinas terkait penyampaian data/informasi laporan hasil pemeriksaan BPK atas program kartu prakerja tahun anggaran 2020-2024
6. Penyampaian nota dinas kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait permohonan persetujuan konsep surat tindak lanjut (TL) atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas LK TA 2024
7. Penyampaian nota dinas kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terkait permohonan penandatanganan nota dinas pengantar

- atas surat tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan MPPKP tahun 2024
8. Penyusunan dan/atau penyampaian beberapa laporan pengawasan, diantaranya Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian Tahun Anggaran 2024, Laporan Hasil Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan, Laporan Hasil Reviu Buka Blokir Kemenko Perekonomian Tahun Anggaran 2025, Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Semester I 2025, Laporan Hasil Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2026, Laporan Hasil Audit Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Tahun Anggaran 2024, dan Laporan Hasil Reviu atas RKBMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2027.

Pelaksanaan rencana aksi hingga Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi efisiensi sumber daya diproyeksikan sebesar Rp50.000, yang berasal dari penghematan biaya logistik penyampaian nota dinas konsep tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian TA 2024 yang disampaikan melalui pemanfaatan media digital dan penyampaian secara daring. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya yang mendukung IKU 1.5 Survey Penilaian Integritas pada triwulan IV dalam rangka menyelenggarakan acara Hari Peringatan Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 yang membahas terkait integritas dan profesionalisme dalam mewujudkan pemerintahan bersih dan ekonomi kuat.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat hambatan yang dihadapi dalam mencapai target karena adanya perubahan kebijakan sehingga kedua rencana aksi tersebut tidak dapat dilaksanakan.

1.5 Survey Penilaian Integritas (SPI)

Latar Belakang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan Survei Penilaian Integritas (SPI) secara mandiri dengan dibantu oleh pihak ketiga. Survei Penilaian Integritas (SPI) bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan mengukur keberhasilan dampak yang diciptakan dari beragam upaya pemberantasan serta pencegahan korupsi di masing masing kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD). Survei Penilaian Integritas (SPI) berusaha menangkap penilaian persepsi dan pengalaman berbagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yaitu pegawai, pengguna layanan/mitra kerjasama, dan eksper/ahli dari beragam kalangan. Dimensi penilaian mencakup transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa (PBJ), pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi. Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai mitra KPK dalam pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) membantu menyediakan data responden yang diperlukan oleh KPK.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Survey Penilaian Integritas (SPI) pada tahun 2025 adalah 82 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektor tahun 2025.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, realisasi Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah 81,77 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.5 1.5. Survey Penilaian Integritas (SPI)	Nilai	82	81,77	99,72%

Survey Penilaian Integritas (SPI) merupakan *cascading indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2025 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 84,01. IKU ini didapatkan dari Hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sampai dengan laporan ini disusun, KPK telah mengumumkan indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025 pada laman resmi SPI KPK yaitu berada di angka 81,77 (kategori terjaga).

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.5 Survey Penilaian Integritas (SPI)			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I-IV)	Status (hingga Triwulan IV)	Keterangan (hingga Triwulan IV)
	Triwulan I		
1.	Rapat Koordinasi terkait Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024	Tertunda dan Digeser	Rapat koordinasi terkait hasil survei penilaian integritas (SPI) tahun 2024 belum dilaksanakan dan rencananya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
	Triwulan II		
2.	Rapat Koordinasi terkait Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024	Terlaksana	Rapat Koordinasi terkait Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2024 telah dilaksanakan
3.	Penunjukkan PIC SPI Tahun 2025	Terlaksana	Penunjukkan PIC SPI Tahun 2025 telah dilaksanakan

4.	Penyusunan dan penyampaian Matriks Tindak Lanjut Hasil SPI Tahun 2024	Terlaksana	Penyusunan dan penyampaian Matriks Tindak Lanjut Hasil SPI Tahun 2024 telah dilaksanakan
5.	Permintaan data calon responden SPI Tahun 2025 kepada unit kerja	Terlaksana	Permintaan data calon responden SPI Tahun 2025 kepada unit kerja telah dilaksanakan
6.	Penyampaian data responden SPI Tahun 2025 ke KPK	Terlaksana	Penyampaian data responden SPI Tahun 2025 ke KPK telah dilaksanakan
Triwulan III			
7.	Pemantauan Tindak Lanjut hasil SPI Tahun 2024	Terlaksana	Pemantauan tindak lanjut hasil SPI Tahun 2024 telah dilaksanakan
8.	Pemantauan pengisian survei oleh responden	Terlaksana	Pemantauan pengisian survei oleh responden telah dilaksanakan
9.	Sosialisasi Anti Korupsi	Tertunda dan Digeser	Sosialisasi anti korupsi belum dilaksanakan dan rencana akan dilaksanakan pada triwulan IV
Triwulan IV			
10.	Sosialisasi Anti Korupsi	Terlaksana	Sosialisasi anti korupsi telah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2025 dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025
11.	Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi SPI selama tahun 2025	Terlaksana	Laporan pelaksanaan dan evaluasi SPI selama tahun 2025 telah disusun

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Publikasi hasil survei penilaian integritas Kemenko Perekonomian Tahun 2024
2. Koordinasi bersama unit kerja terkait untuk menindaklanjuti hasil survei penilaian integritas (SPI) Tahun 2024
3. Pemasangan Banner survei penilaian integritas (SPI) di depan ruang rapat yang ada di lingkungan Kemenko Perekonomian
4. Rapat pelaksanaan survei penilaian integritas (SPI) Tahun 2025 dan penyusunan kriteria responden

5. Penyampaian nota dinas terkait pelaksanaan survei penilaian integritas (SPI) tahun 2025
6. Penyampaian nota dinas terkait penyampaian capaian pelaksanaan survei penilaian integritas (SPI) tahun 2025
7. Penyampaian nota dinas terkait konsep undangan *talkshow* dalam rangka Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi efisiensi penggunaan sumber daya diproyeksikan sebesar Rp100.000, yang berasal dari penghematan biaya pengiriman nota dinas penyampaian capaian pelaksanaan survei penilaian integritas tahun 2025 melalui pemanfaatan sistem digital (*paperless*). Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi dalam rangka menyelenggarakan acara Hari Peringatan Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 yang membahas terkait integritas dan profesionalisme dalam mewujudkan pemerintahan bersih dan ekonomi kuat.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, tidak terdapat kendala yang mempengaruhi ketercapaian rencana aksi sehingga seluruh rencana aksi pada IKU Survey Penilaian Integritas (SPI) telah terlaksana.

1.6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)

Latar Belakang

LAPOR adalah kanal pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sebagai amanat dari penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, LAPOR dimanfaatkan menjadi aplikasi umum untuk layanan pengaduan. Pemanfaatan aplikasi LAPOR dapat dilihat dari seberapa sering masyarakat menggunakan aplikasi LAPOR sebagai sarana menyampaikan pengaduan kepada K/L/D. Tidak terbatas pada pengaduan, LAPOR juga dapat digunakan sebagai sarana menyampaikan aspirasi dan melakukan permintaan informasi. Kinerja instansi pemerintah dalam penggunaan LAPOR diukur dengan 6 kriteria yaitu:

1. Memiliki SK Pengelola,
2. Memiliki Rencana aksi,
3. 90% pengaduan yang diterima ditindaklanjuti dan jumlah pengaduan yang diterima >100 laporan,
4. Kecepatan tindak lanjut < 3 hari,
5. Pengaduan ditindaklanjuti secara substantif
6. Rata-rata rating penilaian masyarakat >4

Berikut kategori penilaian Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR):

Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR	Nilai
Memenuhi 6 indikator	5
Hanya memenuhi 4 dari 6 indikator	4
Hanya memenuhi 3 dari 6 indikator	3
Hanya memenuhi 2 dari 6 indikator	2
Hanya memenuhi maksimal 1 dari 6 indikator	1

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) tahun 2025 sebesar 3 didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektor Tahun 2025.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, realisasi Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) adalah N/A dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.6 1.6. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	Nilai	3	N/A	N/A

Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) merupakan *cascading indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2025 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 84,01. Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) didapatkan dari hasil evaluasi atas tindak lanjut pengaduan Masyarakat (LAPOR) tahun 2025 yang dilakukan oleh Evaluator Meso (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Hingga laporan ini disusun, Kementerian PAN-RB belum menerbitkan Laporan Hasil Evaluasi atas Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR) tahun 2025 pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, terdapat admin instansi/koordinator yang bertugas melakukan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk mengatasi kendala dalam penyelesaian pengaduan apabila indikator dan target status pengaduan terlihat lamban. Dalam hal ini, yang bertugas menjadi admin instansi/koordinator adalah Inspektur, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan, serta Kepala Biro Hukum dan Organisasi. Sedangkan yang termasuk ke dalam pejabat penghubung adalah Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro Umum, dan Para Sekretaris Kedeputian.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.6 Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I-IV)	Status (hingga Triwulan IV)	Keterangan (hingga Triwulan IV)
	Triwulan I		
1.	Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan SP4N-LAPOR! Triwulan IV Tahun 2024	Terlaksana	Penyusunan laporan hasil pemantauan tindak lanjut pengaduan SP4N-LAPOR! Triwulan IV tahun 2024 telah dilaksanakan

2.	Memperbarui SK Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan SP4N-LAPOR!	Tertunda dan Digeser	SK Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan SP4N-LAPOR! belum dilaksanakan dan rencananya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
	Triwulan II		
3.	Memperbarui SK Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan SP4N-LAPOR!	Terlaksana	SK Tim Koordinasi Pengelola Pengaduan SP4N-LAPOR! telah diperbarui
4.	Pemutakhiran Matriks Pemantauan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR! Semester I Tahun 2025	Terlaksana	Pemutakhiran matriks Pemantauan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR! Semester I Tahun 2025 telah dilaksanakan
5.	Penyusunan Renaksi SP4N-LAPOR! Tahun 2025-2029	Tertunda dan Digeser	Penyusunan renaksi SP4N-LAPOR! tahun 2025-2029 belum dilaksanakan
	Triwulan III		
6.	Penyusunan Renaksi SP4N-LAPOR! Tahun 2025-2029	Tertunda dan Digeser	Penyusunan renaksi SP4N-LAPOR! tahun 2025-2029 belum dilaksanakan karena masih menunggu <i>roadmap</i> resmi dari Kementerian PAN-RB
7.	Penetapan Renaksi SP4N-LAPOR Tahun 2025-2029	Tertunda dan Digeser	Renaksi SP4N-LAPOR! Tahun 2025-2029 belum dapat dilaksanakan
8.	Penyusunan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan SP4N-LAPOR Semester I Tahun 2025	Terlaksana	Laporan hasil pemantauan tindak lanjut pengaduan SP4N-LAPOR! Semester I Tahun 2025 telah disusun
9.	Pemantauan Renaksi SP4N-LAPOR Tahun 2025	Tertunda dan Digeser	Pemantauan renaksi SP4N-LAPOR tahun 2025 belum dapat dilaksanakan
	Triwulan IV		

10.	Penyusunan Renaksi SP4N-LAPOR! Tahun 2025-2029	Gagal Dilaksanakan	Sehubungan dengan belum ditetapkannya <i>Roadmap</i> SP4N-LAPOR! Tahun 2025–2029 oleh Kementerian PAN-RB serta belum tersedianya pedoman penyusunan rencana aksi, pelaksanaan rencana aksi ini belum dapat dilaksanakan
11.	Penetapan Renaksi SP4N-LAPOR Tahun 2025-2029		
12.	Pemantauan Renaksi SP4N-LAPOR Tahun 2025		
13.	Evaluasi Renaksi SP4N-LAPOR! Tahun 2025		
14.	Pemutakhiran Matriks Pemantauan Pengaduan Masyarakat melalui LAPOR! Semester II Tahun 2025	Terlaksana	Matriks pemantauan pengaduan Masyarakat melalui LAPOR! telah dilakukan pemutakhiran hingga Semester II Tahun 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan koordinasi dengan pejabat penghubung untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui website *lapor.go.id*
2. Pelaksanaan bimbingan teknis terkait pengelolaan SP4N-LAPOR!
3. Pelaksanaan rapat koordinasi dan penguatan penggunaan SP4N-LAPOR!

Pelaksanaan rencana aksi sepanjang triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi efisiensi penggunaan sumber daya diproyeksikan sebesar Rp61.515.000 dari penghematan biaya dengan menggabungkan tiga materi pembahasan dalam satu kegiatan rapat yang dilaksanakan dalam beberapa sesi waktu berbeda. Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk kegiatan lainnya yang mendukung IKU 1.5 Survey Penilaian Integritas pada triwulan IV dalam rangka menyelenggarakan acara Hari Peringatan Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2025 yang membahas terkait integritas dan profesionalisme dalam mewujudkan pemerintahan bersih dan ekonomi kuat.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, terdapat hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana aksi karena peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan rencana aksi oleh Evaluator Meso belum diterbitkan, sehingga beberapa rencana aksi tidak dapat dilaksanakan.

1.7 Nilai Kapabilitas APIP (IACM)

Latar Belakang

Kapabilitas APIP (IACM) adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan

perannya secara efektif. Nilai Kapabilitas APIP diberikan oleh BPKP sesuai dengan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri kapabilitas APIP yang telah dilaksanakan. Selain itu Kapabilitas APIP adalah Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas APIP dilaksanakan secara mandiri sebagai upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses pengawasan.

Penilaian Kapabilitas APIP (IACM) mencakup penilaian terhadap 3 (tiga) komponen yaitu: dukungan pengawasan (*enabler*), aktivitas pengawasan (*delivery*), dan kualitas pengawasan (*result*). Adapun untuk masing-masing komponen terdiri dari beberapa elemen, antara lain: dukungan pengawasan (*enabler*) terdiri dari 5 (lima) elemen: pengelolaan SDM; praktik profesional; akuntabilitas dan manajemen kinerja; budaya dan hubungan organisasi; dan struktur tata kelola, aktivitas pengawasan (*delivery*) terdiri dari 2 (dua) elemen: *assurance* dan *consulting*, kualitas pengawasan (*result*) merujuk pada hasil kualitas pengawasan APIP yang dapat memberikan keyakinan yang memadai atas ketataan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas (3E); memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko; dan memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola organisasi.

Level Kapabilitas APIP terdiri dari lima tingkatan yaitu: Level 1 = *Initial*, Level 2 = *Infrastructure*, Level 3 = *Integrated*, Level 4 = *Managed*, Level 5 = *Optimizing*.

Dalam hal BPKP belum menerbitkan laporan hasil penjaminan kualitas pada tahun tersebut, maka nilai yang akan digunakan yaitu nilai hasil dari Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP (IACM) yang dilakukan oleh Inspektorat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menggunakan kriteria penilaian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Nilai Kapabilitas APIP (IACM) pada tahun 2025 sebesar 3,27 didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2025 dan target ini tidak dapat diproyeksikan per triwulan karena IKU Nilai Kapabilitas APIP (IACM) adalah nilai evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP oleh BPKP yang diterbitkan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, realisasi Nilai Kapabilitas APIP (IACM) sebesar 3,28 dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-1.7 1.7. Nilai Kapabilitas APIP (IACM)	Nilai	3,27	3,28	100,31%

Nilai Kapabilitas APIP (IACM) merupakan *cascading indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2025 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 84,01. Nilai Kapabilitas APIP (IACM) didapatkan dari Nilai Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian oleh BPKP. Hingga Triwulan IV Tahun 2025, BPKP belum melakukan evaluasi atas penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Maka dari itu, realisasi capaian kinerja IKU 1.7 Nilai Kapabilitas

APIP (IACM) sebesar 3,28 berdasarkan pada Laporan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menggunakan kriteria penilaian BPKP.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi hingga Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

1.7 Nilai Kapabilitas APIP (IACM)			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I-IV)	Status (hingga Triwulan IV)	Keterangan (hingga Triwulan IV)
	Triwulan I		
1.	Audit Ketaatan	Terlaksana	Audit ketaatan telah dilaksanakan
2.	Penyusunan Laporan Tahunan 2024	Terlaksana	Penyusunan laporan tahunan 2024 telah dilaksanakan
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pedoman Pengawasan dan SOP	Tertunda dan Digeser	Pemantauan dan Evaluasi Pedoman Pengawasan dan SOP belum dilaksanakan dan rencananya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
4.	Pengisian Profil Inspektorat (IACM) pada Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP	Terlaksana	Pengisian profil Inspektorat (IACM) telah dilaksanakan
5.	Penyusunan Draft Matriks Tindak Lanjut Hasil Penilaian IACM Tahun 2024	Terlaksana	Penyusunan draft matriks tidak lanjut hasil penilaian IACM tahun 2024 telah dilaksanakan
6.	Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat melalui Diklat, Webinar, dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Terlaksana	Pengembangan kompetensi SDM Inspektorat telah dilaksanakan melalui Pelatihan Fungsional Auditor Pertama pada tanggal 25 Februari 2025 – 18 April 2025
	Triwulan II		

7.	Pemantauan dan Evaluasi Pedoman Pengawasan dan SOP	Terlaksana	Pemantauan dan Evaluasi Pedoman Pengawasan dan SOP telah dilaksanakan
8.	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Tertunda dan Digeser	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP belum dilaksanakan
9.	Pengisian Profil Inspektorat (IACM) pada Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP	Terlaksana	Pengisian profil Inspektorat (IACM) telah dilaksanakan
10.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penilaian IACM Tahun 2024	Terlaksana	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penilaian IACM Tahun 2024 telah dilaksanakan
11.	Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat melalui Diklat, Webinar, dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Terlaksana	Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat telah dilaksanakan melalui Sertifikasi Akuntan Profesional Tingkat Dasar (<i>Certificate in Accounting, Finance & Business</i>)
	Triwulan III		
12.	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Tertunda dan Digeser	Penilaian mandiri kapabilitas APIP belum dilaksanakan
13.	Audit Kinerja	Tertunda dan Digeser	Audit kinerja belum dilaksanakan
14.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Telaah Sejawat	Terlaksana	Pemantauan tindak lanjut hasil telaah sejawat telah dilaksanakan
15.	Pengisian Profil Inspektorat (IACM) pada Aplikasi Penilaian Kapabilitas APIP	Terlaksana	Pengisian profil Inspektorat (IACM) pada aplikasi penilaian kapabilitas APIP telah dilaksanakan
16.	Pengembangan Kompetensi SDM Inspektorat melalui Diklat, Webinar, dan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	Terlaksana	Pengembangan kompetensi SDM Inspektorat telah dilaksanakan melalui: 1. <i>E-learning</i> Peningkatan Pemahaman Gratifikasi 2025 yang diselenggarakan KPK

			<ol style="list-style-type: none"> 2. Pelatihan Penulisan Laporan Hasil Audit Intern di Lingkungan APIP 3. Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik K/L 4. Pelatihan Asesor dan Tenaga Ahli Skema Akreditasi Lembaga Sertifikasi Manajemen Anti Penyuapan Berdasarkan SNI ISO 37001:2016 dan Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Kepatuhan Berdasarkan SNI ISO 37301:2021
17.	Evaluasi IACM oleh BPKP Tahun 2025	Tertunda dan Digeser	Evaluasi IACM oleh BPKP tahun 2025 belum dilaksanakan
	Triwulan IV		
18.	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Terlaksana	Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP telah dilaksanakan dan dituangkan dalam Laporan Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PW.04.04/44/INS.M.EKON/12/2025 tanggal 15 Desember 2025
19.	Audit Kinerja	Tidak Terlaksana dengan Perubahan	Audit Kinerja tidak dapat dilaksanakan karena beberapa hal (<i>sebagaimana diuraikan pada bagian kendala</i>) dan diganti dengan Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Tahun Anggaran 2025
20.	Evaluasi IACM oleh BPKP Tahun 2025	Gagal Dilaksanakan	Evaluasi IACM oleh BPKP tahun 2025 tidak dapat dilaksanakan karena BPKP sedang melakukan pembaruan peraturan terkait Kapabilitas APIP
21.	Pengisian Profil Inspektorat (IACM) pada Aplikasi	Terlaksana	Pengisian profil Inspektorat (IACM) pada aplikasi penilaian kapabilitas APIP telah dilaksanakan

	Penilaian Kapabilitas APIP		
22.	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Penilaian IACM Tahun 2024	Terlaksana	Pemantauan tindak lanjut hasil penilaian IACM tahun 2024 telah dilaksanakan

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Terdapat 4 SDM Inspektorat yang dilantik menjadi Auditor Ahli Pertama
2. Permohonan izin belajar yang diajukan oleh 4 SDM Inspektorat guna mengembangkan diri serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
3. Terdapat 4 SDM Inspektorat yang mengajukan kenaikan pangkat
4. Terdapat 1 SDM Inspektorat yang telah melaksanakan pelatihan pembentukan fungsional auditor ahli pertama di lingkungan APIP
5. Mengikuti pengembangan kompetensi SDM Inspektorat melalui Webinar BPKP tentang *Digital Forensics in Internal Audit: From Data to Evidence*, Pelatihan *The Microsoft Azure Artificial Intelligence Fundamentals organized by Microsoft*, KOMDIGI, and BINAR, Workshop Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga, Diskusi Kelompok Terpimpin Penyusunan Matriks *Integrated Assurance Objek MRPN-LS Tahun 2026*, dan Talkshow Kolaborasi Bangun Integritas: Dari Data Ke Aksi Nyata
6. Pelaksanaan rapat panel hasil audit dengan tujuan tertentu (ADTT) TA 2024
7. Pelaksanaan *sharing session* implementasi kebijakan dan ketentuan terkait penghitungan angka kredit dan SKP
8. Penyampaian nota dinas terkait pengisian kuesioner pemetaan kemanfaatan dan ekspektasi terhadap APIP
9. Penyampaian surat dinas terkait permohonan permintaan akses kelas *e-Learning* Peningkatan Pemahaman Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
10. Penyampaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kemenko Perekononomian Tahun 2025
11. Pengisian data dan/atau informasi pengawasan intern Kemenko Perekononomian terkait dengan *profiling* APIP, perencanaan dan realisasi pengawasan intern, bauran dan kualitas pengawasan intern, hasil pengawasan pada sektor strategis, dan permasalahan penguatan APIP Kementerian/Lembaga
12. Pegawai Inspektorat menjadi narasumber dalam acara sharing session Evaluasi AKIP pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahannya
13. Pegawai Inspektorat menjadi narasumber dalam acara implementasi piagam audit dan peningkatan kapabilitas APIP pada Kementerian Koordinator Bidang Pangan Tahun 2025
14. Pelaksanaan Konfirmasi Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Tahun Anggaran 2025 ke beberapa lokasi pengawasan
15. Selain pengembangan kompetensi yang disebutkan di atas, SDM Inspektorat meningkatkan kompetensi melalui *Knowledge Sharing Library Café*

"Pengawasan BPKP dalam Sudut Pandang Ekonomi Makro", Webinar Implementasi Sistem Manajemen K3 sebagai Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja, Sosialisasi tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Pelatihan Keprotokolan dan Penanganan Keadaan Darurat, Lokakarya "Penanganan Konflik Kepentingan di Sektor Publik", *Sharing Session Pemanfaatan IKU dan SAKIP*, Forum Konsultasi Publik Tindak Lanjut Rakor Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM, Lokakarya "2025 IIA Indonesia National Conference", Rapat Koordinasi Persiapan Kerja Sama Sponsorship Indonesia Special Economic Zone Investment Summit and Awards (SEZ-ISA), dan Kegiatan "National Oversight & Integrity Forum 2025"

Pelaksanaan rencana aksi hingga Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp1.400.000 dari penghematan biaya keikutsertaan pada webinar *Digital Forensics in Internal Audit: From Data to Evidence* yang diselenggarakan oleh BPKP, yang selanjutnya materi disampaikan kembali melalui Pelatihan Kantor Sendiri (PKS). Hasil efisiensi tersebut dapat dialokasikan untuk pelaksanaan Konfirmasi Audit ke beberapa lokasi pengawasan guna memperoleh keyakinan memadai atas kewajaran dan kepatuhan pelaksana kegiatan.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, secara umum rencana aksi telah dilaksanakan namun beberapa rencana aksi seperti:

1. Evaluasi IACM oleh BPKP tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025, karena BPKP sedang melakukan pembaruan peraturan Kapabilitas APIP; dan
2. Audit kinerja tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025, karena objek pengawasan, yaitu program/unit sedang dalam proses reorganisasi Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mengakibatkan perubahan signifikan sehingga hasil audit berisiko kurang relevan. Selain itu, adanya kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan Inspektorat tidak memungkinkan untuk melaksanakan audit kinerja, sehingga pengawasan dialihkan menjadi Audit atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) TA 2025.

Sebagai upaya perbaikan, pada tahun anggaran berikutnya Inspektorat akan melaksanakan beberapa upaya seperti menyusun dan memperbarui pemetaan risiko (*risk assessment*) pasca reorganisasi sebagai dasar penentuan prioritas pelaksanaan audit kinerja yang lebih relevan dan tepat sasaran serta mengintegrasikan kebijakan efisiensi anggaran ke dalam perencanaan pengawasan dengan mengutamakan kegiatan pengawasan yang berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan organisasi.

2. Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal yang *Agile*

Pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Terwujudnya Ekosistem Pengawasan Internal yang *Agile* ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan
2. Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	Latar Belakang
	Persentase pelaksanaan kegiatan pengawasan mengukur tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan dengan yang telah direncanakan dalam satu tahun. Kegiatan pengawasan yang dimaksud mencakup seluruh bentuk pengawasan internal, seperti audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pemeriksaan lainnya yang tercantum dalam PKPT Inspektorat 2025. Pada awal tahun 2025 Terdapat 42 kegiatan pengawasan yang ditetapkan, terdiri dari 21 kegiatan <i>assurance</i> berupa audit, reviu, dan evaluasi baik yang bersifat <i>mandatory</i> maupun <i>ad hoc</i> yang dilakukan dengan tujuan tertentu dan 21 kegiatan yang masuk maupun mendukung peran <i>consulting</i> seperti pendampingan, sosialisasi kegiatan, pengawasan kegiatan pada unit kerja dan sebagainya.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan adalah sebesar 80% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektor tahun 2025.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, realisasi Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan adalah 83,33% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.1 2.1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	Persentase	80%	83,33%	104,17%

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan merupakan cascading indirect dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2025 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 84,01 sekaligus merupakan cascading direct dari Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 80%. IKU ini dihitung berdasarkan jumlah kegiatan pengawasan yang pada bulan Oktober-Desember 2025 yang mencakup rekapitulasi total kegiatan pengawasan yang terlaksana sepanjang tahun 2025. Terdapat 42 kegiatan pengawasan yang direncanakan pada awal tahun 2025, namun 7 kegiatan tidak dapat terlaksana sama sekali. Sehingga pada triwulan IV, jumlah kegiatan pengawasan yang selesai dikerjakan ada sebanyak 35 kegiatan.

Penghitungan persentase dilakukan dengan membandingkan jumlah kegiatan terlaksana sebanyak 35 terhadap jumlah kegiatan pengawasan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2025 sebanyak 42 kegiatan Pada Triwulan IV sehingga diperoleh angka realisasi sebesar 83,33% atau memenuhi ketercapaian target kinerja 104,17%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi hingga Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.1 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I-IV)	Status (hingga Triwulan IV)	Keterangan (hingga Triwulan IV)
	Triwulan I		
1.	Penetapan PKPT Tahun 2025	Terlaksana	Penyusunan dan penetapan PKPT 2025 telah dilakukan oleh Inspektorat
	Triwulan II		
2.	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	Terlaksana	Telah dilakukan pemantauan dan pembaruan matriks pelaksanaan kegiatan pengawasan
	Triwulan III		
3.	Pelaksanaan Dialog Kinerja	Tertunda dan Digeser	Dialog Kinerja belum dilaksanakan karena terdapat penugasan-penugasan lain yang sifatnya mendesak
4.	Pemantauan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	Terlaksana	Telah dilakukan pemantauan dan pembaruan status pada laman monitoring pelaksanaan kegiatan pengawasan Triwulan III
	Triwulan IV		
5.	Pelaksanaan Dialog Kinerja	Terlaksana	Telah dilaksanakan kegiatan Dialog Kinerja bersama Inspektur, bagian pengawasan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK untuk membahas evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan sepanjang tahun 2025, pembahasan penyusunan Renstra Inspektorat 2025-
6.	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan	Terlaksana	
7.	Penyusunan PKPT Tahun 2026	Terlaksana	

			2029, dan rencana kegiatan pengawasan tahun 2026.
--	--	--	---

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pendampingan dan konsultansi ke unit kerja antara lain:
 - a. Pemberian konsultansi dan pendampingan pelaksanaan penilaian mandiri SPIP pada Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK
 - b. Pelaksanaan Reviu dan Pendampingan Kegiatan *Joint Announcement on the Substantial Conclusion of the IEU-CEPA dan EU Business Outlook*
 - c. Pelaksanaan Reviu Tambahan Anggaran Aksesi OECD Tahun 2024-2025
 - d. Diskusi kebijakan Tenaga Pendukung Tahun 2026 dengan Biro Hukum dan Organisasi, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia, dan para Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
 - e. Pelaksanaan konsultansi dan pendampingan pengadaan *Personal Computer* (PC) untuk pegawai Tahun Anggaran 2026
2. Pelaksanaan Audit atas Kepatuhan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Internal Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Surat Tugas nomor PW.02.02/53/INS.M.EKON/0
3. Pelaksanaan pengisian kertas kerja dan penilaian mandiri profil kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan Surat Tugas nomor: PW.04.04/58.A/INS.M.EKON/12/2025.
4. Pelaksanaan Kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2025
5. Pelaksanaan rapat, pendampingan pembangunan, dan penyusunan laporan pemantauan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
6. Pengisian kertas kerja Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
7. Pelaksanaan konsultansi dan pendampingan pengadaan barang/jasa di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
8. Pengisian kertas kerja dan pelaksanaan penilaian mandiri kapabilitas apip (IACM)
9. Pengisian Sistem Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (Simersi RB) Triwulan I sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025
10. Pemantauan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat dan penerbitan Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) Triwulan IV *On-Going*

Dialog kinerja Inspektorat tahun 2025 diselenggarakan di ruang rapat Inspektorat dan menggunakan media presentasi dengan laptop, hal ini diproyeksikan mengefisiensi anggaran sebesar Rp1.500.000 untuk kebutuhan penyediaan konsumsi dan cetak kertas.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, masih terdapat kendala atau hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja diantaranya beberapa kegiatan pengawasan tidak dapat terlaksana karena dari unit/instansi pembina tidak terdapat pembaruan aturan, himbauan, maupun rencana aksi yang dapat ditindaklanjuti. Namun, demikian Inspektorat secara mandiri tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan kondisi rutin setiap tahun seperti misalnya penilaian

kapabilitas APIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku instansi pembina tidak melaksanakan penjaminan kualitas (PK) untuk tahun 2025 akan tetapi Inspektorat tetap mengisi kertas kerja dan menerbitkan Laporan Penilaian Mandiri (PM).

Kedepan, Inspektorat akan melakukan koordinasi lebih intensif baik secara internal dengan mengadakan rapat internal bersama pimpinan untuk monitoring dan evaluasi progres kegiatan pengawasan. Serta koordinasi dengan unit kerja dan instansi pembina/stakeholders agar pelaksanaan kegiatan pengawasan yang sifatnya kerja sama dapat terencana dan terlaksana sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan.

2.2 Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti

Latar Belakang

Inspektorat sebagai unit pengawas internal melakukan kegiatan Audit dan memberikan rekomendasi atas temuan yang disajikan dalam laporan hasil audit. Inspektorat melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan oleh audit. Audit dapat dikatakan telah menindaklanjuti rekomendasi ketika audit menyelesaikan aksi korektif sesuai dengan rekomendasi atau Ditindaklanjuti secara penuh, sebagian, atau dengan alternatif yang disetujui selanjutnya bukti tindak lanjut akan diverifikasi atau divalidasi oleh APIP.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti pada tahun 2025 adalah sebesar 80% didasarkan pada Perjanjian Kinerja Inspektor tahun 2025.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, realisasi Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti adalah 81,15% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-2.2 2.2 Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti	Persentase	80%	81,15%	101,44%

Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti merupakan *cascading indirect* dari Nilai Reformasi Birokrasi yang pada tahun 2025 ditargetkan untuk mendapat nilai sebesar 84,01 dan dari Perjanjian Kinerja (PK) Inspektor Tahun 2025 ditargetkan sebesar 80%. Pada awal Triwulan IV, terbit Laporan Hasil Audit atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 114 rekomendasi. Sehingga jumlah total rekomendasi yang diberikan Inspektorat sebanyak 191. Hingga akhir triwulan IV, unit kerja telah menindaklanjuti sebanyak 150 rekomendasi.

Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah rekomendasi audit internal yang telah ditindaklanjuti dengan total rekomendasi yang diberikan sepanjang tahun 2025. Hingga akhir Triwulan IV Tahun 2025, rekomendasi audit internal yang telah ditindak lanjuti oleh unit kerja sebanyak 77 rekomendasi pada Triwulan I hingga Triwulan III dan 73 rekomendasi pada Triwulan IV dari total 191 rekomendasi.

Pada Triwulan IV sehingga diperoleh angka realisasi sebesar 78,53% atau memenuhi ketercapaian target kinerja 98,17%

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi hingga Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

2.2 Persentase Rekomendasi Audit Internal yang Ditindaklanjuti			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I-IV)	Status (hingga Triwulan IV)	Keterangan (hingga Triwulan IV)
	Triwulan I		
1.	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi APIP hingga Semester II Tahun 2024	Terlaksana	Pembaruan matriks pemantauan Tindak Lanjut Audit Inspektorat Semester II Tahun 2024 telah dilaksanakan
	Triwulan II		
2.	Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	Terlaksana	Telah dilakukan koordinasi dengan unit kerja terkait penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi APIP
	Triwulan III		
3.	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi APIP hingga Semester I Tahun 2025	Terlaksana	Telah dilakukan pembaruan status pada matriks dan penyampaian hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi internal untuk periode Semester I Tahun 2025 ke unit kerja melalui Nota Dinas nomor: PW.05.01/85/INS.M.EKON/07/2025
	Triwulan IV		
4.	Koordinasi Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	Terlaksana	1. Telah dilaksanakan Rapat Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Internal Semester II Tahun Anggaran 2025 pada tanggal 5 Desember 2025 bersama para PPK untuk membahas progres TL Rekomendasi

			<p>APIP Semester I Tahun 2025 melalui <i>Zoom Meeting</i></p> <p>2. Telah diterbitkan Nota Dinas tentang Pemantauan TL Hasil Pemeriksaan Internal Smt II Tahun 2025 nomor:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PW.05.01/216/INS.M.EK ON/12/2025 (penyampaian matriks pemantauan untuk unit kerja) b. PW.05.01/224/INS.M.EK ON/12/2025 c. PW.05.01/225/INS.M.EK ON/12/2025 (penyampaian tindak lanjut atas uang makan) <p>3. Unit Kerja melalui Pejabat Pembuat Komitmen masing-masing telah menyampaikan Nota Dinas balasan atas Tindak Lanjut Rekomendasi Audit 2024</p>
--	--	--	--

Pelaksanaan rencana aksi selama Triwulan IV Tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Contoh implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya matriks pemantauan dibuat menggunakan aplikasi pengolah data *online* dan pengiriman Nota Dinas dilakukan menggunakan aplikasi Srikandi sehingga seluruh proses tindak lanjut rekomendasi dapat d'efisiensi atas anggaran diproyeksikan sebesar Rp300.000. Selain itu, pelaksanaan koordinasi juga dilakukan melalui *Zoom Meeting* sehingga menghemat anggaran penyediaan konsumsi sebesar Rp2.500.000. Total efisiensi tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2025.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target adalah adanya pegawai yang sudah purna tugas dan pindah tugas ke unit kerja/instansi lain sehingga koordinasi belum berjalan maksimal dan status beberapa rekomendasi masih belum selesai. Namun, secara umum pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi audit internal terlaksana dengan

Kedepan Inspektorat akan meningkatkan komunikasi melalui rapat atau berkirim nota dinas secara rutin tiap triwulan atau tiap semester dengan unit kerja dan seluruh pihak yang terkait. Hal ini agar pelaksanaan pemantauan atas rekomendasi audit internal dapat terkoordinasi lebih baik dan seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara maksimal oleh unit kerja sesuai dengan *timeline* yang telah ditetapkan dan disepakati bersama.

3.

Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Transformasi APIP sebagai *Trusted Advisor* dan *Strategic Partner*

Pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Terwujudnya Transformasi APIP sebagai *Trusted Advisor* dan *Strategic Partner* ditunjukkan oleh pencapaian 2 (dua) indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kepuasan Layanan Inspektorat
2. Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Indeks

Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat

Latar Belakang

Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat merupakan hasil pengukuran tingkat kepuasan pelayanan yang diberikan dengan melakukan survey layanan kepada unit organisasi lainnya di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Daftar pertanyaan ini memuat tentang 5 aspek-aspek penilaian yang memuat tentang jenis-jenis layanan di lingkungan Manajemen Kinerja dan Kerja Sama, serta output dari peningkatan yang dihasilkan. Aspek – aspek penilaiannya meliputi:

1. Aspek Ketanggapan dalam layanan (*Responsiveness*);
Menggambarkan kesiapan dan kecepatan unit kerja dalam merespons permintaan, keluhan atau kebutuhan layanan
2. Aspek Keandalan dalam layanan (*Reability*);
Mengukur sejauh mana layanan yang diberikan sesuai dengan prosedur atau standar layanan
3. Aspek Sarana dan Prasarana Layanan (*Tangible*);
Menilai ketersediaan dan kualitas fisik/fasilitas, serta tampilan lingkungan kerja yang mendukung layanan
4. Aspek Kepastian dalam Layanan (*Assurance*);
Mengukur kemampuan dan kompetensi petugas dalam memberikan layanan, serta tingkat kepercayaan dan rasa aman
5. Aspek Sikap dalam Layanan (*Emphaty*):
Menunjukan perhatian dan kepedulian secara personal dan manusiawi pada layanan yang diberikan

Pada akhir survei terdapat tambahan form penulisan saran dan perbaikan. Jumlah Responden dipilih secara acak/random, dan berasal dari unit kerja di luar unit Inspektorat. Nilai indeks diperoleh dari nilai rata-rata hasil kuesioner yang telah diliisi oleh koresponden, dengan 4 kategori, yaitu :

1. Sangat Puas (4), rentang nilai 3,51 – 4,00
2. Puas (3), rentang nilai 3,01 – 3,50
3. Tidak Puas (2), rentang nilai 2,51 – 3,00
4. Sangat Tidak Puas (1), rentang nilai <2,50

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat pada tahun 2025 sebesar 3 dari 4 didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Inspektor tahun 2025.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, capaian Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.1 3.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat	Indeks	3 dari 4	3,65	100%

Penghitungan Indeks atas Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat adalah dengan membandingkan jumlah rerata jawaban dari masing-masing unit survei dengan jumlah item survei. Pada Semester I, penilaian kepuasan layanan dilakukan atas dua aspek yakni Aspek Kompetensi dan Aspek Kinerja Auditor dengan perolehan nilai **3,62** berada dalam kategori **Sangat Puas**.

Merujuk hasil penilaian semester I, terdapat perbaikan dan penyempurnaan instrumen survei sehingga di Semester II aspek penilaian dirinci menjadi lima antara lain Aspek Ketanggapan, Aspek Keandalan, Aspek Sarana dan Prasarana, Aspek Asurans, dan Aspek Sikap. Pada Semester II, nilai rata-rata per aspek penilaian diatas 3,50 dan total penilaian kepuasan layanan pengawasan Inspektorat sebesar **3,65** dalam kategori **Sangat Puas**.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi hingga Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

3.1 Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Inspektorat			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I-IV)	Status (hingga Triwulan IV)	Keterangan (hingga Triwulan IV)
	Triwulan I		
1.	Sosialisasi Layanan Inspektorat	Tertunda dan digeser	Sosialisasi layanan Inspektorat belum dilaksanakan dan rencananya akan dilaksanakan pada periode berikutnya
2.	Penyusunan <i>Draft</i> Survei Kepuasan Layanan	Terlaksana	Formulir untuk pengisian survei kepuasan layanan kegiatan pengawasan di Inspektorat telah selesai
3.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan	Tertunda dan Digeser	Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan ditunda ke periode berikutnya
4.	Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Layanan	Tertunda dan Digeser	Hasil Survei Kepuasan Layanan belum dapat direkapitulasi karena

			pelaksanaan Survei mengalami penundaan ke Triwulan IV
	Triwulan II		
5.	Sosialisasi Layanan Inspektorat	Terlaksana	Pelaksanaan sosialisasi telah dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan orientasi CPNS
6.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan	Terlaksana	Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas kegiatan konsultansi)elah dilaksanakan.
7.	Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Layanan	Terlaksana	Telah terdapat <i>database</i> yang memuat rekapitulasi hasil survei kepuasan layanan
	Triwulan III		
8.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan	Terlaksana	Telah dilakukan koordinasi dengan unit kerja untuk pengisian survei kepuasan layanan Inspektorat untuk pejabat tinggi dan pegawai melalui Nota Dinas nomor PW.06.11/112/INS.M.EKON/08/2025 dan PW.06.11/113/INS.M.EKON/08/2025.
9.	Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Layanan	Terlaksana	Telah dilakukan rekapitulasi atas hasil pengisian survei
	Triwulan IV		
10.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan	Terlaksana	Telah dilaksanakan survei kepuasan atas layanan pengawasan inspektorat melalui gform yang diisi oleh audit/unit kerja penerima layanan.
11.	Rekapitulasi Hasil Survei Kepuasan Layanan	Terlaksana	Telah dilakukan pembaruan matriks dan rekapitulasi atas

			pengisian survei kepuasan layanan Inspektorat
12.	Evaluasi Hasil Survei Kepuasan Layanan	Terlaksana	Telah disusun Laporan Survei Kepuasan Layanan Inspektorat 2025

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pendampingan penyusunan profil risiko unit kerja dan mitigasi unit kerja tahun 2025
2. Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2024
3. Pelaksanaan Rapat Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025
4. Pelaksanaan Reviu dan Pendampingan Kegiatan *Joint Announcement on the Substantial Conclusion of the IEU-CEPA dan EU Business Outlook*
5. Pelaksanaan reviu atas usulan tambahan anggaran kebutuhan biaya aksesi OECD Tahun 2024-2025
6. Pelaksanaan konsultansi dan pendampingan pengadaan *Personal Computer (PC)* untuk
7. Pelaksanaan Kegiatan Talkshow Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) Tahun 2025 pada 11 Desember 2025

Pelaksanaan rencana aksi hingga Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi efisiensi sumber daya diantaranya penggunaan *google form* sebagai media untuk menghimpun survei dari penerima layanan (audit/unit kerja). Serta pemanfaatan *cloud computing* untuk mengelola dan menyimpan data terkait survei kepuasan layanan. Nilai efisiensi atas penggunaan media digital dalam pelaksanaan survei diproyeksikan menghemat sebesar Rp1.000.000 digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2025, dalam kegiatan ini juga terdapat pengisian survei oleh para pegawai.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, tidak terdapat kendala signifikan yang mempengaruhi ketercapaian rencana aksi. Upaya perbaikan atas pencapaian target yang telah dilakukan oleh Inspektorat adalah meningkatkan kompetensi dan kapabilitas auditor, mengoptimalkan peran *Person In Charge (PIC)* dan media sosial Inspektorat sebagai sarana komunikasi dan sosialisasi kegiatan, memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam rangka optimisasi pelaporan dan sarpras pengawasan, melaksanakan evaluasi berkala dengan perbaikan metodologi dan indikator sehingga umpan balik yang didapatkan juga dapat meningkatkan kualitas laporan pengawasan Inspektorat.

3.2 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi

Latar Belakang

Peran konsultansi APIP adalah salah satu fungsi utama dalam kerangka pengawasan intern pemerintah selain fungsi *assurance* (audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan). Dalam fungsi konsultansi, APIP memberikan masukan, pendampingan, dan solusi kepada unit kerja atau perangkat daerah untuk meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian

intern. Kegiatan Konsultansi bertujuan untuk membantu unit kerja mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, mendorong terciptanya tata kelola yang baik (*good governance*), dan memperkuat peran APIP sebagai *trusted advisor*. Kegiatan konsultansi dilakukan untuk mengetahui tingkat keaktifan APIP dalam peran konsultatif, tidak terbatas pada kegiatan yang sifatnya *assurance* seperti audit/reviu dan meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi antara APIP dan pengguna layanan.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi adalah 90%. Penghitungan persentase dilakukan dengan membandingkan jumlah kegiatan konsultansi yang selesai ditindaklanjuti terhadap permintaan konsultansi yang masuk.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi sebesar 100% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-3.2 3.2 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi	Persentase	90%	100%	111,11%

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi merupakan *cascading indirect* dari Perjanjian Kinerja (PK) Inspektur Tahun 2025 ditargetkan sebesar 90%. Pada Triwulan IV Tahun 2025, realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi adalah 100%. Penghitungan atas persentase dilakukan dengan membandingkan jumlah konsultansi yang masuk dan jumlah yang telah ditindaklanjuti dan selesai.

Sepanjang 2025 terdapat 53 permohonan konsultansi yang seluruhnya telah selesai ditindaklanjuti. Kegiatan konsultansi diantaranya mendampingi/menjadi narasumber pada kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit kerja lain. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

1. Penyusunan Rencana Aksi Dan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 Setiap Unit Kerja Dilaksanakan Sebanyak 6 Kali;
2. Rapat Tindak Lanjut Reviu Manual IKU Dan Rencana Aksi Tahun 2025 Pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara;
3. *Coaching Clinic* Manajemen Risiko (MR) Dilaksanakan Sebanyak 4 Kali;
4. Pendampingan Pengawasan PPPK Tahun 2025;
5. *Sharing Session* Evaluasi AKIP;
6. Pendampingan Permintaan Keterangan Dan Data Evaluasi Atas Tata Kelola *Tax Expenditure* Tahun 2025;
7. Tanggapan Temuan BPK Atas Laporan Keuangan TA 2024;
8. Review Rencana Aksi RB General Dan Tematik Kemenko Perekonomian Tahun 2025 Dilaksanakan Sebanyak 2 Kali;
9. Pembahasan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2025-2026;
10. *Sharing Session* Pemanfaatan IKU Dan SAKIP Pada Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan Dan Ekonomi Digital;

11. Pendampingan Implementasi Manajemen Risiko Pada Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus;
12. Pelaksanaan Koordinasi Persiapan Kerja Sama *Sponsorship Indonesia Special Economic Zone Investment Summit And Awards* (SEZ-ISA) 2025;
13. Sosialisasi Implementasi Piagam Audit Dan Peningkatan Kapabilitas APIP;
14. Pendampingan Penyempurnaan Pohon Kinerja Tingkat Deputi Kemenko Perekonomian Tahun 2025;
15. Pendampingan Proses Pengadaan Dan Pelaksanaan Kegiatan *Joint Announcement On The Substantial Conclusion Of The IEU-CEPA Dan EU Business Outlook*;
16. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2027
17. Diskusi Kelompok Terpumpun Penyusunan Matriks Integrated Assurance Objek MRPN-LS Tahun 2026
18. Koordinasi Dan Penguatan Penggunaan SP4N-LAPOR
19. Koordinasi Penilaian Kinerja Organisasi
20. Koordinasi Penilaian Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas (ZI) WBK/WBBM
21. Pelaksanaan konsultansi atas penelaahan uraian tugas pegawai Non-ASN Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi
22. Pelaksanaan Reviu Draft Renstra Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama dan Investasi, serta Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Tahun 2025-2029
23. Pelaksanaan Reviu Konsep Standar Pelayanan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
24. Reviu atas Usulan Tambahan Anggaran Kebutuhan Biaya Akses OECD Tahun 2024-2025

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi hingga Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

3.2 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I-IV)	Status (hingga Triwulan IV)	Keterangan (hingga Triwulan IV)
	Triwulan I		
1.	Sosialisasi Layanan Inspektorat	Tertunda dan Digeser	Sosialisasi layanan Inspektorat belum dilaksanakan dan rencananya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
2.	Penyusunan <i>Logbook</i> Layanan Konsultansi	Terlaksana	<i>Logbook</i> dan prosedur Layanan Konsultansi telah selesai disusun

	Triwulan II		
3.	Sosialisasi Layanan Inspektorat	Terlaksana	Pelaksanaan sosialisasi telah dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan orientasi CPNS
4.	Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi	Terlaksana	Kegiatan konsultansi telah dilaksanakan
5.	Rekapitulasi Status Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi	Terlaksana	Rekapitulasi status pelaksanaan kegiatan konsultansi telah dilaksanakan
	Triwulan III		
6.	Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi	Terlaksana	Kegiatan konsultansi telah dilaksanakan
7.	Rekapitulasi Status Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi	Terlaksana	Rekapitulasi status pelaksanaan kegiatan konsultansi telah dilaksanakan
	Triwulan IV		
8.	Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi	Terlaksana	Telah dilakukan beberapa kali kegiatan pendampingan ke unit kerja terkait berbagai topik antara lain: Manajemen Risiko, Pengisian SPIP, Temuan Internal/Eksternal, Pengadaan Barang/Jasa, hingga Pembangunan ZI
9.	Rekapitulasi Status Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi	Terlaksana	Telah dilakukan pembaruan matriks rekapitulasi pelaksanaan kegiatan konsultansi
10.	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Konsultansi	Terlaksana	Telah disusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Konsultansi Inspektorat Tahun 2025

Pelaksanaan rencana aksi hingga Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi dari efisiensi penggunaan sumber daya adalah pelaksanaan kegiatan pendampingan dan konsultansi dilakukan sebagian besar dibiayai oleh unit kerja yang mengirim permintaan konsultansi dan pendampingan. Beberapa kegiatan konsultansi dan pendampingan juga dilaksanakan melalui *Zoom Meeting* sehingga efisiensi diproyeksikan sebesar Rp3.500.000 dari penghematan biaya cetak bahan rapat dan konsumsi rapat.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, tidak terdapat kendala yang mempengaruhi ketercapaian rencana aksi. Namun beberapa masukan diperoleh dari unit kerja penerima layanan konsultansi. Atas masukan tersebut Inspektorat telah melakukan beberapa perbaikan seperti penyusunan SOP Penyusunan Pedoman Konsultansi, SOP Pelaksanaan Layanan Konsultansi, Draft Keputusan Inspektur Kemenko Perekonomian tentang Pedoman Jasa Konsultansi, dan pelaksanaan diskusi melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM.

Kedepan, Inspektorat akan lebih intensif dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan unit kerja baik Eselon I maupun unit bagian yang memiliki peran dalam bidang pengadaan dan keuangan seperti UKPBJ, Pokja Keuangan, PPSPM. Pelaksanaan reviu juga akan dilakukan secara reguler sebagai upaya untuk memastikan pengendalian internal berjalan.

4. Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola APIP Yang Baik

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Terwujudnya Tata Kelola APIP Yang Baik ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat

Capaian indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

4.1

Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat

Latar Belakang

Persentase pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Inspektorat. Adapun komponen penilaian Reformasi Birokrasi di level Inspektorat didasarkan pada tingkat implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi General di lingkungan Inspektorat. Implementasi kegiatan RB General di Inspektorat harus didasarkan dan disesuaikan pada rencana aksi yang telah disusun pada awal tahun.

Hasil Pengukuran Kinerja

Target Kinerja atas IKU Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat tahun 2025 sebesar 85% didasarkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2025.

Hingga Triwulan IV Tahun 2025, realisasi Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat adalah 92,73% dengan ringkasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Kinerja
IKU-4.1 4.1 Persentase Pelaksanaan	Persentase	85%	92,73%	109,09%

Reformasi Birokrasi Inspektorat				
------------------------------------	--	--	--	--

Penghitungan Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat dilakukan dengan membandingkan total renaksi Reformasi Birokrasi yang telah dilaksanakan dengan total renaksi Reformasi Birokrasi yang dirumuskan dikali 100%.

Pada tahun 2025, Inspektorat melaksanakan dukungan terhadap Indikator Kegiatan Utama (IKU) Reformasi Birokrasi lainnya diluar rencana aksi yang diampu oleh Inspektorat yang meliputi:

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
2. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
3. Tingkat Digitalisasi Arsip
4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
5. Indeks Sistem Merit
6. Capaian IKU

Penyusunan IKU Reformasi Birokrasi (RB) lainnya diluar rencana aksi yang diampu oleh Inspektorat yang tertera pada Manual IKU Perjanjian Kinerja Inspektur didasarkan pada *benchmarking* IKU tahun 2024. Atas keenam IKU yang telah ditetapkan tersebut, pada tahun 2025 Inspektorat tidak memiliki rencana aksi yang mendukung IKU Indeks Sistem Merit namun Inspektorat mendapat tambahan untuk mendukung IKU tingkat implementasi rencana aksi pembangunan RB, indeks perencanaan pembangunan, dan indeks pelayanan publik.

Inspektorat memiliki 55 rencana aksi yang mendukung Indeks Reformasi Birokrasi lainnya diluar rencana aksi yang diampu oleh Inspektorat yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2025. Terdapat 51 rencana aksi yang terlaksana dan 4 rencana aksi yang tidak terlaksana, sehingga diperoleh realisasi IKU 4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat sebesar 92,73%.

Pelaksanaan Rencana Aksi TW IV dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Rencana aksi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Sesuai dengan rencana aksi yang telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pelaksanaan rencana aksi hingga Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

4.1 Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat			
No.	Rencana Aksi (Triwulan I-IV)	Status (hingga Triwulan IV)	Keterangan (hingga Triwulan IV)
	Triwulan I		
1.	Pengisian Rencana Aksi RB General	Tertunda dan Digeser	Pengisian rencana aksi RB General belum dilaksanakan dan rencananya akan

			dilaksanakan pada triwulan berikutnya
2.	Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat	Tertunda dan Digeser	Pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi Inspektorat belum dilaksanakan dan rencananya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
	Triwulan II		
3.	Pengisian Rencana Aksi RB General	Terlaksana	Pengisian rencana aksi RB General telah dilaksanakan
4.	Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat	Tertunda dan Digeser	Pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi Inspektorat belum dilaksanakan dan rencananya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
5.	Pengisian Simersi TW I	Tertunda dan Digeser	Pengisian simersi TW I belum dilaksanakan dan rencananya akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya
	Triwulan III		
6.	Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat	Tertunda dan Digeser	Pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi Inspektorat belum dilaksanakan
7.	Pengisian Simersi TW I	Tertunda dan Digeser	Pengisian Simersi TW I belum dilaksanakan
8.	Pelaksanaan Dialog Kinerja	Tertunda dan Digeser	Pelaksanaan dialog kinerja belum dilaksanakan
9.	Pengisian Simersi TW II	Tertunda dan Digeser	Pengisian Simersi TW II belum dilaksanakan
	Triwulan IV		
10.	Pemantauan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat	Terlaksana	Pemantauan pelaksanaan reformasi birokrasi Inspektorat telah dilaksanakan.
11.	Pelaksanaan Dialog Kinerja	Terlaksana	Dialog Kinerja telah dilaksanakan baik secara daring maupun luring.

12.	Pengisian Simersi TW I	Terlaksana	Melalui Nota Dinas nomor: OT.05/213/SET.M.EKON.2/10/2025 tanggal 20 Oktober 2025, Biro Hukum dan Organisasi mengimbau pengisian Simersi TW I sampai dengan TW III. Telah ditindaklanjuti dan selesai pada tanggal 28 Oktober 2025.
13.	Pengisian Simersi TW II	Terlaksana	
14.	Pengisian Simersi TW III	Terlaksana	
15.	Pengisian Simersi TW IV	Terlaksana	Melalui Nota Dinas nomor: OT.05/280/SET.M.EKON.2/10/2025 tanggal 24 Desember 2025, Biro Hukum dan Organisasi mengimbau pengisian Simersi TW IV sehingga pengisian Simersi TW IV telah ditindaklanjuti dan selesai dilaksanakan.
16.	Evaluasi Pelaksanaan RB Inspektorat	Terlaksana	Telah selesai dilaksanakan dan diterbitkan Laporan Hasil Evaluasi Internal <i>on-going</i> Triwulan IV.

Selain pelaksanaan rencana aksi di atas, upaya lain yang telah dilakukan untuk pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut.

1. Pelaksanaan rapat penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Internal (LHEI) Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan IV TA 2024
2. Penyusunan LHEI RB Triwulan IV TA 2024
3. Pelaksanaan rapat evaluasi Hasil Sementara RB tahun 2024 dan pendalaman bukti dukung sanggah evaluasi RB
4. Pelaksanaan rapat pembahasan target capaian RB General tahun 2025
5. Penyampaian konsep rencana aksi RB General tahun 2025
6. Pelaksanaan reviu penyusunan rencana aksi RB General dan RB Tematik Kemenko Perekonomian tahun 2025
7. Pelaksanaan rapat penguatan pelaksanaan RB tahun 2025
8. Pelaksanaan rapat final reviu bukti dukung SIMERSI RB General dan Tematik Kemenko Perekonomian Triwulan I-III tahun 2025

Pelaksanaan rencana aksi hingga Triwulan IV tahun 2025 telah mempertimbangkan aspek efisiensi penggunaan sumber daya. Implementasi efisiensi penggunaan sumber daya diantaranya pengisian dan penyampaian rencana aksi RB General menggunakan lembar kerja pada media digital sehingga proyeksi efisiensi yang dilakukan adalah sebesar Rp100.000 dari biaya pembelian kertas dan penyampaian rencana aksi secara daring.

Kendala dan Upaya Perbaikan Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, tidak terdapat kendala yang mempengaruhi ketercapaian rencana aksi sehingga seluruh rencana aksi pada IKU Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah terlaksana.

Jakarta, 12 Januari 2026
Inspektur,

Mirza Sofjanhadi Mashudi